



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A
SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

Upaya Amerika Serikat Mengamankan Kepentingan Nasional di Libya Pasca Muammar Gaddafi Dalam Rangka Mengamankan Hegemoni di Timur Tengah

Skripsi

Oleh

Raden Muhammad Reza Kusumawijaya

2016330072

Pembimbing

Dr. I Nyoman Sudira, Drs. M.Si.

Bandung

2019

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

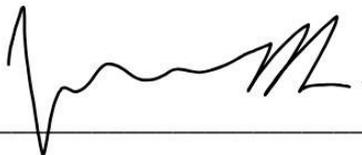


Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Raden Muhammad Reza Kusumawijaya
Nomor Pokok : 2016330072
Judul : Upaya Amerika Serikat Mengamankan Kepentingan Nasional di Libya Pasca Muammar Gaddafi Dalam Rangka Mengamankan Hegemoni di Timur Tengah

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Selasa, 28 Juli 2020
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua sidang merangkap anggota
Adrianus Harsawaskita, S.IP., MA

: 

Sekretaris
Dr. I Nyoman Sudira

: 

Anggota
Edil Syawfi, S.IP., M.Si

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A
SK BAN-PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

Upaya Amerika Serikat Mengamankan Kepentingan Nasional di Libya Pasca Muammar Gaddafi Dalam Rangka Mengamankan Hegemoni di Timur Tengah

Skripsi

Oleh

Raden Muhammad Reza Kusumawijaya

2016330072

Pembimbing

Dr. I Nyoman Sudira, Drs. M.Si.

Bandung

2019

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raden Muhammad Reza Kusumawijaya

NPM : 2016330072

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Upaya Amerika Serikat Mengamankan Kepentingan Nasional di Libya Pasca Muammar Gaddafi Dalam Rangka Mengamankan Hegemoni di Timur Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian ini merupakan hasil karya tulisan ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 17 Juli 2020,



Raden Muhammad Reza Kusumawijaya
2016330165

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat terkait kebijakannya di Libya pasca Arab Springs tahun 2011 hingga 2019. Kondisi politik Libya yang mengalami instabilitas pasca Arab Springs berdampak pada kekosongan politik dan lemahnya legitimasi terhadap pemerintahan sementara yang kemudian menyebabkan berkembangnya kelompok terorisme (*Islamic State*) di negara tersebut. Penelitian ini dilakukan menggunakan teori neorealisme dari Kenneth Waltz untuk menjelaskan kondisi sistem internasional yang membuat Amerika Serikat melakukan upaya untuk menghadapi ancaman dan peningkatan kekuatan di Libya. Peneliti juga, mengacu pada konsep kepentingan nasional Amerika Serikat yang dikemukakan Robert J. Art untuk menunjukkan kepentingan nasional yang dimiliki oleh AS di Libya pasca Arab Springs. Penelitian ini menemukan bahwa dalam rangka menjaga kepentingan nasionalnya di Libya serta , Amerika Serikat melakukan perimbangan kekuatan yang diproyeksikan secara internal maupun eksternal. Amerika Serikat menggunakan kekuatan militer melalui *counterinsurgency* dan penggunaan *drone attacks* serta kekuatan non-militer melalui kerjasama dalam upaya *rebuilding* Libya.

Kata Kunci: Amerika Serikat, Libya, *Islamic State*, Neorealisme, Kepentingan Nasional

Abstract

This research aim to explain the efforts made by the United States regarding its policies in Libya post Arab Springs in 2011 to 2019. Libyan has experienced instability political conditions after Arab Springs that impacted on the political vacuum and lack of legitimacy interim government which later led to the development of terrorism groups (Islamic State) in that country. This research was conducted using the theory of neorealism from Kenneth Waltz to explain the condition of the international system that triggered United States to make an efforts to reduce threats and increasing power in Libya. Researcher also referring to the concept of the national interests of the United States by Robert J. Art to show the national interests possessed by the US in Libya post Arab Springs. The research found that in the context of safeguarding its national interests in Libya, the United States carried out a balance of power that was projected internally and externally. The United States uses military force through the use of drone attacks and non-military force through cooperation in Libya's rebuilding efforts.

Keywords: United States, Libya, Islamic State, Neorealism, National Interests

Kata Pengantar

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan karunia-Nya, skripsi yang berjudul “Upaya Amerika Serikat Mengamankan Kepentingan Nasional di Libya Pasca Muammar Gaddafi Dalam Rangka Mengamankan Hegemoni Timur Tengah” dapat terselesaikan. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M.Si sebagai dosen pembimbing yang telah membantu mengarahkan dan memberi saran demi terselesaikannya penelitian ini.

Penelitian ini dilakukan sebagai syarat kelulusan dalam menempuh studi S1 jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Parahyangan, Bandung. Kemudian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada penelitian lainnya kedepan terkait keberadaan Amerika Serikat di Kawasan Timur Tengah dan Libya. Terakhir, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi pada berkembangnya studi ilmu hubungan internasional selanjutnya.

Ucapan Terima Kasih

- Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan karunia-Nya membantu penulis menyelesaikan skripsi di waktu yang tepat. Begitu pula kepada alam semesta yang telah menjadi tempat bagi penulis untuk selalu belajar dan berkembang menjadi lebih baik. Terutama bagi HI Unpar yang telah menjadi rumah kedua selama 4 tahun terakhir dan memberikan pembelajaran akademis dan non-akademis.
- Terima kasih kepada keluarga, Ayah Amin Amperana dan Ibu Azharyanti sebagai orang tua penulis yang selalu berjuang baik dalam segi materi maupun moril yang pada akhirnya mendorong penulisan ini segera terselesaikan. Terima kasih untuk dukungan dan kekuatan yang tidak pernah habis untuk penulis hingga saat ini. Khususnya kepada Lazuardi sebagai kakak sekaligus sahabat terbaik yang selalu mendukung dan mengingatkan penulis menyelesaikan perkuliahan secepat mungkin.
- Terima kasih kepada Dr. I Nyoman Sudira karena telah memberikan banyak waktu dan perhatian bagi penulis. Serta untuk saran dan semangatnya sehingga penulisan ini mampu diselesaikan dengan masukan terbaiknya.
- Terima kasih kepada Mas Adri dan Mas Idil untuk saran dan kritik terkait skripsi yang ditulis oleh peneliti sehingga menghasilkan penelitian yang lebih baik.
- Terima kasih kepada teman-teman yang telah menemani 'keseruan' penulis sejak Semester 1, Yoga Halim, Nikolas Aditya, Farrel Prabaswara, Reydi,

Yusuf (Ucup), Yafie. Khususnya kosan Aceng yang menjadi base camp terbaik selama di kampus.

- Terima kasih kepada teman-teman PMKT khususnya Rangga Cesario, Monique Giaramita, Shanty F. Putri dan seluruh INKOR PMKT Visible yang telah mewujudkan salah satu impian penulis untuk membuat event Pasar Malam dengan skala besar di kampus.
- Terima kasih kepada teman-teman ngeluh, ngopi, dan musik, Luki, dan Janji yang selalu menemani penulis untuk ngobrol ringan di kedai kopi. Serta Uqi yang menemani pengerjaan seminar sampai subuh di Dunkin Donuts.
- Terima kasih sebesar-besarnya untuk Junks Radio, yang memberikan tempat gratis bagi peneliti untuk melakukan penulisan dan menjadi wadah kreatif bagi peneliti selama menjadi mahasiswa aktif di Unpar. Khususnya kepada Tama Khrisna yang telah menjadi teman diskusi peneliti selama penelitian berlangsung.
- Terima kasih kepada teman-teman Paradox, khususnya Tubagus Iman, Daud, Alex, Adam, Reza Evaldo, Hammam telah menjadi pengwujud impian lainnya dengan membuat acara seni dengan skala besar.
- Terima kasih kepada Richard Theo dan Nadia Viranissa yang sudah lulus duluan sehingga menjadi acuan bagi penulis untuk menyusul semester setelahnya. Terima kasih untuk bantuan tugas dan referensi tulisan yang baik.

- Terima kasih kepada Taman Cibeunying telah menjadi tempat melepas penat bagi peneliti selama pengerjaan skripsi, beserta orang di dalamnya yang selalu bersedia menjadi tempat bersandar bagi peneliti.
- Terima kasih kepada Putri Adelia Natasha berkat dorongan terbaiknya mampu menjadi semangat bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk waktu luang, menjadi teman untuk melepas penat, menjadi sahabat untuk diskusi bisnis, hingga menjadi pendengar yang sangat baik jika penulis ceramah banyak soal Amerika Serikat, Libya, dan isu politik. Akhirnya lulus juga!

DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
Abstract.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	4
1.2.1 Perumusan Masalah.....	6
1.2.2. Pembatasan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	7
1.4 Kajian Literatur.....	8
1.5 Kerangka Pemikiran.....	11
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	18
1.6.1 Metode Penelitian.....	18
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data.....	18
1.7 Sistematika Pembahasan.....	19

Bab II KONDISI STRATEGIS AMERIKA SERIKAT DALAM MENJAGA HEGEMONI DI TIMUR TENGAH.....	21
2.1 Konstelasi Politik di Libya Pasca Arab Springs Mengancam Kontrol AS di Libya.....	22
2.1.1 Kondisi dan Ancaman Keamanan Libya Pasca Arab Springs...	25
2.1.2 Peningkatan Pengaruh Kelompok Terorisme di Libya (2011-2014).....	29
2.2 Perspektif Strategis AS Terkait Peningkatan Konflik di Libya.	33
2.2.1 Pengaruh Amerika Serikat di Kawasan Timur Tengah sebagai negara hegemon.....	35
2.2.2 Peran Amerika Serikat di Libya dalam upaya menurunkan pengaruh terorisme.....	40
BAB III PEMBAHASAN.....	44
3.1 Upaya Amerika Serikat Mengamankan Kepentingan Nasional Yang Terganggu Oleh Kondisi Politik Di Libya.....	44
3.1.1 Konfigurasi <i>power</i> di Timur Tengah sejak tahun 2011 - 2017..	46
3.1.1.1 Peningkatan kekuatan militer Iran Menjadi Kekuatan Pesaing AS di Libya.....	46
3.1.1.2 Penguatan Kerjasama Alutsista Sebagai Respon Peningkatan Konflik di Libya.....	52
3.1.2 Strategi rebuilding Libya dalam upaya menjaga proses demokrasi.....	55
3.1.3 Upaya Amerika Serikat menjaga akses terhadap minyak mentah Libya.....	61
3.2 Upaya balance of power AS terhadap Gangguan Kepentingan Nasionalnya di Libya.....	66

3.2.1 Strategi <i>counterinsurgency</i> AS terhadap Kelompok Ekstrimis di Timur Tengah.....	68
3.2.2 Peningkatan kekuatan AS secara internal Terkait Konflik Libya	72
3.2.3 Peningkatan kekuatan AS secara eksternal melalui aliansi terkait konflik Libya.....	79
BAB IV KESIMPULAN.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	88

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Anggaran Militer Libya sejak tahun 2011-2017 (in USD).....	49
-----------	--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Transisi Pemerintahan Libya.....	23
Gambar 2.2	Map Kontrol Penyerangan ISIS Mei 2016.....	28
Gambar 2.3	Timeline Aksi Penyerangan Isis.....	31
Gambar 3.1	Daya Jangkau Misi Balistik Iran.....	51
Gambar 3.2	Personel Amerika Serikat di Timur Tengah.....	73
Gambar 3.3	Penyerangan Udara AS (Drone, and Artillery) di Libya.....	78

BAB 1

PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang Masalah

Pasca Perang Dingin, runtuhnya perimbangan kekuatan setiap negara dalam sistem internasional memaksa beberapa perkembangan isu internasional dikuasai atau dipengaruhi oleh negara-negara barat.¹ Konsekuensi tersebut diperkuat dengan alasan bahwa keunggulan militer yang dimiliki oleh negara-negara ‘Barat’ umumnya, serta Amerika Serikat khususnya, tidak lagi mampu diimbangi oleh kekuatan negara lain dalam sistem. Kemudian runtuhnya bipolaritas dalam sistem internasional memengaruhi adanya kepentingan yang lebih monolistik oleh negara-negara adidaya yang mampu menguasai negara dunia ketiga atau negara yang cenderung lebih lemah. Tanpa adanya penantang ideologis, kekuatan negara-negara ‘Barat’ mampu memaksakan kondisi hukum, sosial, dan politik kepada negara lemah sebagai ganti rugi akses bantuan, perdagangan, dan pengakuan yang telah diberikan. Negara adidaya pun mampu menggunakan kekuatannya untuk menekan negara lain untuk menyesuaikan dengan rezim yang berkuasa atau dalam hal ini memaksakan norma yang dianut seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan anti-terorisme.²

Sebagai negara adidaya, Amerika Serikat perlu memperluas seta memperbesar kekuatannya baik dari segi ekonomi maupun militer. Kawasan

¹ Ole Waever, Barry Buzan, “Region and Power”, *Cambridge University Press : New York*, 2003, 7.

² *Ibid*, 10.

Timur Tengah merupakan kawasan strategis dengan sumber daya alam yang melimpah. Adanya pengaruh yang besar dari Uni Soviet dengan paham komunisme di negara-negara Timur Tengah pada saat perang dingin menambah urgensi Amerika Serikat untuk terlibat dalam pengaruh di kawasan tersebut. Tujuan dari Amerika Serikat dapat dirangkum dalam 3 hal yakni, kebutuhan akan akses minyak yang berlimpah dari negara di kawasan Timur Tengah, kepentingan untuk menyebarkan paham demokrasi dan menurunkan pengaruh Uni Soviet di kawasan, menjaga eksistensi Israel sebagai negara melawan kontradiksi dari negara-negara Arab, serta menjalankan kepentingannya untuk meredam terorisme yang berkembang di kawasan.³ Penelitian ini akan difokuskan pada pengaruh Amerika Serikat di Libya pasca penggulingan Presiden Muammar Gaddafi tahun 2011.

Hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Libya mengalami pasang surut sejak sistem pemerintahan monarki yang dipimpin oleh Raja Idris dianggap sebagai pemerintahan yang pro-AS hingga adanya kudeta yang dilakukan oleh Muammar Gaddafi. AS telah mengembangkan kehadirannya di regional Timur Tengah khususnya Libya melalui ekonomi dan militer pada tahun 1963 ketika Libya menemukan cadangan minyak dalam kuantitas besar yang menguntungkan pihak AS.⁴ Pasca kudeta revolusioner, Libya mulai merestrukturisasi hubungannya dengan AS. Muammar Gaddafi sebagai pemimpin Libya pada saat

³ Michael C. Hudson, "The United States in the Middle East", in *International Relations in Middle East*, Oxford University Press: 2016, 357.

⁴ Youssef M. Sawani, "The United States and Libya: Turbulent History and Uncertain Future", *E-International Relations*, 27 Desember 2014, Accessed on August 29, 2019.

itu mengubah kebijakan dan memperlihatkan upaya untuk merusak kepentingan AS di Libya dengan cara mengusir investasi terhadap minyak dan memaksa militer AS keluar dari Libya dengan mensponsori beberapa kelompok teroris untuk menyerang AS. Hingga pada tahun 1979, hubungan diplomatik antar kedua negara tersebut diberhentikan secara sepihak oleh AS dan memberikan sanksi selama dua dekade kepada Libya.⁵ Pada tahun 2003, Libya dan AS memulihkan kembali hubungan diplomatiknya setelah Gaddafi menyetujui untuk memberhentikan pengembangan *Weapon Mass Destruction* dan menjadi bagian untuk memerangi terorisme.⁶

Tahun 2011 menjadi periode yang begitu menegangkan bagi regional Timur Tengah dan sebagian negara Afrika Utara. Serangkaian pemberontakan pro-demokrasi dilakukan oleh negara di berbagai negara yang dipimpin oleh rezim otoriter. Beberapa negara yang terkena dampak oleh rangkaian pemberontakan tersebut antara lain adalah Tunisia, Maroko, Suriah, Libya, Mesir, dan Bahrain yang disebut sebagai *Arab Springs* atau ‘Musim Semi Arab.’⁷ Dampak dari pemberontakan tersebut menyebabkan adanya kekosongan pemerintahan sementara di Libya. Perebutan kekuasaan antar kelompok di Libya menghambat proses transisi politik di negara tersebut. Amerika Serikat sebagai salah satu anggota UNSC yang menyetujui adanya Resolusi 1970 dan Resolusi

⁵ Ibid

⁶ “Libya to Give Up WMD”, *BBC News*, 20 Desember 2003, Accessed on August 29, 2019. <http://news.bbc.co.uk/2/hi/3335965.stm>

⁷ “Arab Spring”, *HISTORY*, Updated on 5 April 2019, Accessed August 29, 2019, <https://www.history.com/topics/middle-east/arab-spring>

1973 serta melakukan intervensi militer menjadi pihak yang turut membantu proses transisi tersebut dalam rangka menjalin hubungan dengan Libya yang lebih baik di masa depan.

1.2 Identifikasi Masalah

Intervensi dari pihak luar dan ancaman internal maupun eksternal dapat menghalangi pemulihan tujuan negara untuk menyelesaikan konfliknya. Libya merupakan negara yang berbasis kesukuan serta salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia. Sejak diresmikannya *National Transitional Council* oleh PBB selepas terbunuhnya Muammar Gaddafi, Libya mengalami berbagai konflik yang menyebabkan munculnya perang sipil. Ancaman terhadap keamanan, ekonomi, politik, hingga kemanusiaan merupakan tugas setiap negara untuk dapat diselesaikan sebab negara mempunyai kewajiban untuk mewujudkan tujuan dan menetapkan kepentingan nasionalnya. Negara sebagai entitas politik yang sah harus dapat menjamin keamanan warganya dan memastikan kesejahteraan dari warganya.

Pasca meninggalnya Muammar Gaddafi oleh sekelompok pemberontak *anti-gaddafi* yang didukung oleh koalisi NATO, pemerintahan Libya kemudian dijalankan oleh pemerintahan sementara yaitu *National Transitional Council* yang dipimpin oleh Mustafa Abdul Jalil. Sejak tanggal 20 September 2011, PBB telah memberikan kursi pemerintahan kepada NTC yang disusul oleh pengakuan dari negara lain mengenai NTC sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah pasca

kepemimpinan rezim Muammar Gaddafi.⁸ NTC memiliki tujuan dan bertugas untuk memastikan keamanan warga Libya dari konflik serta menjaga keamanan teritorial negaranya. Membebaskan Libya dari kondisi darurat, mendukung setiap organisasi lokal yang berusaha memulihkan kondisi Libya, dapat menyelenggarakan pemilihan umum, dapat melindungi perbatasan negaranya dengan berkoordinasi dengan Dewan Militer, dan mengatur hubungan dengan negara lain serta dapat mewakili aspirasi rakyat Libya.⁹ Namun NTC hanya bertahan selama 10 bulan seiring dengan berbagai pemberontakan yang terjadi di Libya.

Pemilihan NTC sebagai pemerintahan sementara Libya tidak disambut dengan baik oleh masyarakat. Pemberontakan terhadap pemerintah terutama yang dilakukan oleh kota-kota yang tidak terintegrasikan ke dalam Libya pasca Arab Springs menyebabkan adanya hambatan pemulihan terhadap pemerintahan baru serta konflik antar sipil. Pemberontakan yang terjadi akibat pemilu pertama Libya melahirkan *General National Congress* yang terpilih menjadi pemerintahan yang melanjutkan kinerja NTC.

Konflik sipil Libya sejak pemilu pertama hingga 2012 tidak menemui penyelesaian secara damai. Bahkan sejak tahun 2014, Libya secara massa terbagi menjadi dua kubu. Kubu *Government National Accord* yang diakui oleh *international community* dan kubu lainnya adalah *Libyan National Army* dibawah kepemimpinan Khalifah Haftar yang merupakan bekas tentara pada masa

⁸ "National Transitional Council", *NTC Libya*, Accessed on January 18, 2020, <http://ntclibya.org/>

⁹ Ibid

pemerintahan Muammar Gaddafi.¹⁰ Konflik sipil yang berlangsung antara GNA yang diakui secara internasional dan memegang daerah kekuasaannya di bagian barat dengan LNA yang berbasis di bagian timur membuat keamanan Libya rentan oleh peningkatan terorisme. Dinamika politik yang tak kunjung usai di Libya pasca kepemimpinan Muammar Gaddafi membuat kelompok islamis mengambil sikap oportunistik untuk mencegah adanya kedaulatan dan kesejahteraan yang seimbang di Libya.¹¹

1.2.1 Perumusan Masalah

Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh penulis pada bagian latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah yang ada. Rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah : **Apa upaya Amerika Serikat Untuk Mengamankan Kepentingan Nasionalnya Terkait Peningkatan Konflik di Libya Pasca Arab Springs Dalam Rangka Menjaga Hegemoni di Timur Tengah ?**

1.2.2. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah perlu dilakukan untuk menghasilkan penelitian yang fokus dan efektif. Penelitian ini akan berfokus pada upaya memenuhi kepentingan Amerika Serikat di Libya pasca rezim Muammar Gaddafi untuk mempertahankan hegemoni AS di kawasan Timur Tengah. Amerika Serikat melalui NATO berhasil menggulingkan rezim Gaddafi melalui intervensi militer pada masa *Arab Springs*.

¹⁰ "A Quick Guide to Libya's Main Players", *European Council on Foreign Relations*, Published on October 2016, Accessed on January 19, 2020, https://www.ecfr.eu/mena/mapping_libya_conflict

¹¹ Lachlan, Wilson and Jason Pack, "The Islamic State's Revitalization in Libya and its Post-2016 War of Attrition", *CTC Sentinel*, March 2019

Selepas hal tersebut, Amerika Serikat dianggap menarik militernya dari kawasan Timur Tengah dan berpindah ke Asia. Namun dalam upaya untuk memenuhi kepentingan nasionalnya, Amerika Serikat masih terlibat dalam upaya demokratisasi dan pemberantasan terorisme di Libya, hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga hegemoni Amerika Serikat di Timur Tengah. Penelitian ini difokuskan pada periode pasca Muammar Gaddafi tahun 2011 hingga 2019.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam tulisan ini adalah untuk menganalisa kepentingan Amerika Serikat di Libya sebagai bentuk hegemoni Amerika Serikat di Timur Tengah. Sistem internasional yang anarki memaksa setiap negara untuk melindungi negaranya sendiri dan mendorong setiap negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya melalui berbagai cara. Diharapkan penelitian ini mampu menggambarkan secara jelas bagaimana upaya yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Libya pasca Arab Springs.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Bagi penulis, penelitian ini adalah bentuk penerapan dari materi pembelajaran yang telah ditempuh selama masa pembelajaran di program studi Hubungan Internasional. Dalam visi akademisi dapat bermanfaat untuk menambah kemampuan penulis dalam melakukan sebuah bentuk penelitian. Bagi para penstudi Hubungan Internasional, penulis berharap hasil penelitian ini dapat

menjadi referensi untuk memahami kepentingan nasional Amerika Serikat khususnya di regional Timur Tengah pasca turunnya Muammar Gaddafi.

1.4 Kajian Literatur

Keterlibatan Amerika Serikat di Libya setelah intervensi militer tahun 2011 dijalankan berdasarkan adanya kepentingan dalam membasmi kelompok terorisme dan proses demokratisasi negara-negara di Timur Tengah pasca Arab Springs. Lisa Watanabe dalam sebuah jurnal yang berjudul “Islamic State in North Africa: Still There, Struggling to Expand” menuliskan bahwa keberadaan IS saat ini mulai mendirikan kehadirannya di Kawasan Afrika Utara setelah dianggap berhasil di Timur Tengah. IS yang dipimpin oleh Abu Bakar al-Baghdadi sejak 2014 berhasil mendeklarasikan kekhalifahan di daerah Suriah Timur dan Irak Barat yang sekaligus berbatasan dengan Sirta di Libya.

Jurnal ini membahas mengenai berkembangnya *Islamic State* di Afrika Utara yang berhasil menurunkan peran Al-Qaeda sebagai organisasi jihad transnasional yang terkemuka. Sejalan dengan terjadinya perang sipil di Libya antara GNA dan LNA sejak 2014, pasukan IS memanfaatkan peluangnya untuk berlindung bagi para militan IS dan Libya memiliki lokasi yang strategis untuk ekspansi IS ke negara-negara sekitarnya seperti Aljazair, Chad, Mesir, Niger, Sudan, dan Tunisia. Kemudian Lisa Watanabe beranggapan bahwa mempertahankan posisi Anti-IS oleh Amerika Serikat merupakan hal vital yang perlu dilakukan. Hal tersebut mampu mengurangi potensi pertumbuhan jangka pendek IS di kawasan Afrika Utara karena menggunakan bantuan militer tidak cukup jika posisi IS dalam

kontraterorisme serta dukungan terhadap pemerintah yang legitimasi tidak dijalankan.¹²

Dalam menanggapi peningkatan eksistensi *Islamic States* ataupun kelompok jihadis lainnya Christopher M. Blanchard dan Carla E. Humud dalam jurnalnya yang berjudul “The Islamic State and U.S. Policy” menjelaskan bagaimana dua presiden menjabat selama kasus ini berlangsung yaitu Barrack Obama dan Donald Trump mengambil keputusan terkait isu yang berkembang. Barrack Obama berusaha untuk mengalahkan kelompok teroris melalui tindakan militer AS secara langsung dan melalui dukungan terhadap mitra lokal. Sedangkan Donald Trump berupaya mengarahkan pemerintahannya untuk mengembangkan rencana secara komprehensif serta meningkatkan kontribusi AS terhadap stabilisasi wilayah di kawasan tersebut. Pada umumnya jurnal ini membahas mengenai peran sentral AS masih terjadi Arab Springs. Bantuan dalam bentuk militer seperti penjagaan terhadap perbatasan hingga melancarkan berbagai operasi di berbagai negara yang menjadi basis kelompok terorisme masih dilakukan oleh Amerika Serikat demi menjaga hegemoni negaranya di Timur Tengah hingga Afrika Utara.¹³

Kemudian, Emma Ashford berpendapat bahwa keberadaan Amerika Serikat di Timur Tengah dinilai tidak efektif dan justru menurunkan kepercayaan negara mitra akan eksistensinya di regional tersebut. Dalam jurnalnya yang berjudul “Unbalanced: Rethinking America’s Commitment to the Middle East” Emma

¹² Lisa Watanabe, “Islamic State in North Africa: Still There, Struggling to Expand”, *Middle East Policy Council* Vol.29, No. 2, (2017).

¹³ Christopher M. Blanchard and Carla E. Humund, “The Islamic State and U.S. Policy”, *Congressional Research Service*, September 25, 2018.

mengungkapkan bahwa sudah seharusnya AS menjalankan strategi *offshore balancing* dikarenakan tujuan anti-komunis dan pengamanan terkait minyak di negara-negara Timur Tengah tidak lagi relevan secara geopolitik dan perubahan teknologi. Penjagaan militer secara maksimal dan pembiayaan yang besar untuk kebutuhan militer tidak sebanding dengan gagalnya kebijakan *pivot to Asia* yang dilakukan Obama serta kegagalan di beberapa negara seperti Libya, Irak, dan Afghanistan yang saat ini masih terjadi perang sipil dan belum menjalankan paham demokrasi membuat tujuan dari Amerika Serikat di regional tersebut hingga saat ini belum tercapai.

Emma menegaskan bahwa sudah seharusnya Amerika Serikat menggunakan kekuatannya secara efektif untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Strategi *offshore balancing* mampu menurunkan keberadaan militer AS di Timur Tengah yang dinilai sudah tidak mampu meningkatkan stabilitas di kawasan dan justru sebaliknya. Pendekatan melalui *offshore balancing* tidak menyiratkan Amerika Serikat melepaskan diri dari pengaruhnya bagi negara-negara di kawasan, namun secara diplomatis dan ekonomi Amerika Serikat perlu melakukan pendekatan yang lebih efektif.¹⁴

Berdasarkan ketiga jurnal yang dikaji, penelitian ini akan membahas mengenai upaya Amerika Serikat dalam menjaga hegemoninya di kawasan Timur Tengah melalui strategi *offshore balancing* dalam menghilangkan pengaruh teorisme di Libya khususnya dan umumnya Timur Tengah. Tujuan penelitian ini

¹⁴ Ashford, Emma. "Unbalanced: Rethinking America's Commitment to the Middle East." *Strategic Studies Quarterly* 12, no. 1 (2018): 127-148.

adalah mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan oleh Amerika Serikat pasca Arab Springs dalam upaya menghilangkan pengaruh terorisme yang berkembang di Libya. Kemudian penelitian ini akan membahas mengenai hasil dari strategi *offshore balancing* yang dilakukan oleh Amerika Serikat.

1.5 Kerangka Pemikiran

Dalam memahami upaya Amerika Serikat dalam menjalankan kepentingan nasional di kawasan Timur Tengah, terdapat beberapa teori yang dapat menjadi kerangka untuk dapat membantu mendeskripsikan isu yang diangkat. Teori tersebut digunakan sebagai dasar pemikiran untuk mendefinisikan serta menganalisa isu utama dalam penelitian yang dilakukan. Salah satu teori yang dapat digunakan adalah *national interest* yang dikemukakan oleh Hans J. Morgenthau dan Robert J. Art. Pada dasarnya, setiap negara pasti memiliki *national interest* masing-masing, tak terkecuali dengan Amerika Serikat yang menganggap dirinya sebagai *superpower* di dunia. Terdapat 2 elemen dalam kepentingan nasional, yang pertama adalah untuk pemenuhan kepentingan negaranya sendiri sedangkan yang kedua adalah tindakan dilakukan karena kondisi eksternal.¹⁵

Kepentingan Nasional diutarakan oleh Hans J Morgenthau yang berkembang sejak dekade 1940-an didefinisikan sebagai kekuasaan yang berusaha dicapai setiap negara dalam kehadirannya di politik internasional yang dianggap sebagai arena atau tempat bagi setiap negara untuk memperebutkan kekuasaan atau

¹⁵ Hans J. Morgenthau, "Another 'Great Debate': The National Interest of the United States", *The American Political Science Review*, (December 1952)

struggle for power dalam upaya untuk memenuhi kepentingan masing-masing negara. Setiap negara dapat menggunakan dua cara untuk melakukan kebijakan luar negeri yaitu *soft power* ataupun *hard power*.¹⁶ Konsep kepentingan nasional berupaya untuk mempertahankan eksistensi suatu negara di regional atau dalam skala global dan fokusnya dapat berubah seiring kebutuhan dari tiap negara serta dapat berubah karena keadaan regional yang mendesak. Kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri merupakan dua hal yang saling berkaitan karena kepentingan suatu negara dapat menentukan arah kebijakan suatu negara yang akan mempengaruhi hubungan dengan negara lain.

Menurut Morgenthau dalam bukunya yang berjudul *Politics Among Nations : The Struggle for Power and Peace*, hakikat politik internasional adalah memperjuangkan kepentingan. Setiap negara akan melihat secara faktual ketertarikan antara alasan dan fakta dalam politik internasional. Dinamika antar bangsa yang terjadi menurutnya adalah bahwa setiap negara dituntut untuk memenuhi *national interest* yang dapat dicapai baik melalui dialog maupun peperangan.¹⁷ Upaya pemenuhan kepentingan tersebut dapat dilakukan untuk keberlangsungan setiap negara dalam rangka menjaga stabilitas regional ataupun memperkuat kekuatan suatu negara (*struggle for power*). Konsep *national interest* dari Morgenthau juga lebih mementingkan adanya *national survival* dari tiap negara dibandingkan dengan moralitas dan etika politik internasional. Maksudnya

¹⁶ Hans J. Morgenthau, "Politics Among Nations : The Struggle for Power and Peace", *New York: Alfred P. Knopf*, (1948) 8-10

¹⁷ "Politics Among Nations", 5-7

adalah setiap negara akan lebih mengutamakan pencapaian tujuan dibandingkan seruan moralitas dari negara lain, konsep *national interest* lebih jelas lagi berkeyakinan bahwa setiap negara akan menyingkirkan etika moral jika hal tersebut tidak dapat memberikan jaminan bagi kelangsungan suatu negara.¹⁸

Pasca Uni Soviet mengalami *collapse*, AS menjadi satu-satunya negara *superpower* yang tidak dapat diganggu kekuatannya. Hal tersebut selaras menjadi semakin meningkatnya kepentingan nasional Amerika Serikat dalam upaya untuk memberikan pengaruh terhadap perilaku negara lain untuk melakukan apa yang AS inginkan. Dalam buku Robert J Art yang berjudul *A Grand Strategy of America*, dirinya membagi kepentingan nasional AS kedalam tiga bagian yaitu *vital, highly important, and important*. Pembagian tersebut menunjukkan apabila AS tidak dapat mencapai kepentingan nasional *vital* nya maka keamanan dan kebutuhan dasar ekonomi Amerika Serikat akan berisiko besar dan memungkinkan terjadi *collapse*, namun jika kepentingan pada bagian *important* tidak dapat terpenuhi maka AS akan terkena dampak kerugian namun tidak sebesar bagian yang pertama.¹⁹ Selain itu, Art menjelaskan bahwa dalam menggunakan *military power* terdapat tiga kegunaan yaitu menggunakan kekuatan militer untuk mencegah musuh melakukan strategi (*deterrence*), kemudian memaksa musuh untuk mengubah perilakunya terhadap Amerika Serikat

¹⁸ "Politics Among Nations", 11.

¹⁹ Robert J. Art, "A Grand Strategy for America", (Cornell University Press, 2003), 8

(*compellence*), dan yang terakhir melindungi negaranya sendiri terhadap tindakan musuh yang telah diambil (*defense*).²⁰

Amerikat Serikat mampu mendorong negara lain untuk menuju nilai yang dianut seperti demokrasi, pasar bebas, HAM, dan keterbukaan dalam dunia internasional. Amerika Serikat perlu melakukan penguatan strategi yang dapat memenuhi kepentingan nasionalnya. Mengedepankan serangkaian tujuan mendasar bagi Amerika Serikat. Memusatkan sumber daya politik-militer AS pada wilayah yang dianggap penting saja. Mempertahankan posisi pertahanan negara. Menetapkan ketentuan kapan perlu berperang. Menyerukan kepemimpinan dari Amerika Serikat sebagai hegemoni regional.²¹

Teori lainnya yang mendukung dalam analisa mengenai kepentingan nasional Amerika Serikat pasca Mammarr Gaddafi adalah neorealisme yang dikemukakan oleh Kenneth Waltz. Menurut Waltz, dalam menjalankan kepentingan nasional setiap negara secara otomatis merespon kendala dan perintah sistem internasional. Setiap negara akan berusaha mencapai kepentingan nasionalnya sesuai dengan kondisi internal serta eksternal sehingga setiap negara akan mengetahui kapan di mana harus berpindah sesuai dengan respon yang diterima dari sistem internasional.²²

²⁰ Robert J. Art, "A Grand Strategy for America", 5

²¹ Robert J. Art, "A Grand Strategy for America", 121-123.

²² Robert Jackson, George Sorensen, (2013),P. 81

Negara besar akan selalu cenderung untuk mengimbangi kekuatan atau ancaman yang muncul. Setelah Amerika Serikat menjadi satu-satunya kekuatan besar dalam sistem internasional, AS menjadi kekuatan yang dapat mendominasi negara yang lebih lemah akan bergabung dengan negara yang lebih kuat sebagai upaya untuk mengamankan otonomi yang maksimum. Kemudian menurut Waltz, negara adalah *power-seeking and security concious* dikarenakan sistem internasional yang memaksa hal tersebut. Sehingga neorealisme tidak menyangkal adanya kemungkinan untuk melakukan kerjasama. Namun, mereka mempertahankan bahwa negara yang bekerjasama akan berusaha untuk memaksimalkan kekuatan dan mempertahankan otonomi mereka.

Kenneth Waltz berpendapat bahwa konstelasi politik global memiliki sistem internasional yaitu anarki. Anarki merupakan bentuk bahwa tidak adanya pemerintahan yang berlegitimasi dan kompeten di atas negara. Maka dari itu, setiap negara akan selalu waspada terhadap negara lain dikarenakan tidak ada organisasi berwenang yang mampu mengatur perilaku negara dalam konteks global.²³ Selanjutnya, negara akan melakukan segala cara untuk bertahan. Neorealisme menyebutnya dalam *self-help* yaitu setiap negara perlu menggunakan seluruh kemampuannya untuk melindungi negaranya dari ancaman negara lain. Dalam sistem *self-help*, negara akan selalu merasa khawatir akan kemampuan

²³ Kenneth N. Waltz. "The Structure of World Politics". Edited by Robert Jarvis. In *International Politics: Enduring Concepts and Contemporary Issues*. United States: Pearson Education, 2009. 45-48.

bertahannya dalam sistem internasional sehingga peningkatan keamanan suatu negara baik individual maupun koalisi membuat setiap negara merasa terancam.²⁴

Kemudian, Kenneth Waltz menjelaskan bahwa Balance of Power mengasumsikan bahwa negara adalah aktor yang selalu berusaha untuk mencapai tujuan pribadinya. Lebih lanjut upaya tersebut didasarkan adanya keinginan untuk menjadi dominasi universal dalam sebuah sistem. Dalam mencapai tujuannya tersebut, setiap negara melakukan penguatan upaya secara internal yang meliputi peningkatan kekuatan ekonomi dan kekuatan militer. Sedangkan dalam penguatan eksternal, negara melakukan upayanya melalui penguatan aliansi untuk memperlemah lawannya.²⁵

Balance of Power tidak hanya bergantung pada hambatan internasional, melainkan pada karakteristik suatu negara karena struktur internal negara yang berbeda memengaruhi kebijakan eksternal negara. Maka dari itu upaya Balance of Power akan dapat diadaptasi apabila setiap negara dalam sistem memiliki perilaku yang serupa. Balance of Power merupakan prinsip utama dari teori neorealisme dari Kenneth Waltz, sehingga terdapat dua persyaratan dari Balance of Power yaitu dalam tatanan sistem yang anarki maka setiap negara perlu melakukan *self-help* dalam upaya untuk mencegah munculnya hegemoni baru di dalam sistem yang dapat memicu perebutan kekuasaan.²⁶ Balance of power mengklaim bahwa keseimbangan kekuatan membentuk negara terhadap dua hasil,

²⁴ Ibid

²⁵ Kenneth N Waltz, "Theory of International Politics", (Reading: Addison-Wesley, 1979), P.118

²⁶ Ibid, P. 121

apakah suatu negara melakukan perimbangan kekuatan dalam upaya mempertahankan keseimbangan atau suatu negara bertujuan untuk melakukan dominasi universal.²⁷ Hal tersebut dipandang oleh Kenneth Waltz dalam neorealisme sebagai hasil bukan sebagai motif.

Terdapat lima asumsi tentang sistem internasional yang memperlihatkan bahwa negara bersaing satu sama lain untuk kekuasaan dan berjuang untuk menjadi hegemoni. Dari lima asumsi yang ada tidak ada satupun asumsi yang memperlihatkan bahwa negara berperilaku kompetitif, namun justru memperlihatkan bahwa setiap negara memiliki alasan yang cukup untuk berpikir dan berperilaku agresif terhadap negara lain. Asumsi pertama adalah sistem internasional bersifat anarki. Asumsi kedua adalah kekuatan besar yang memiliki kapabilitas militer ofensif dapat berpotensi untuk menguasai negara lain. Asumsi ketiga adalah negara tidak akan pernah bisa yakin dengan intensi negara lain. Asumsi keempat adalah *survival* merupakan tujuan setiap negara terutama *great powers* untuk mempertahankan integritas teritorialnya. Terakhir, asumsi kelima adalah *great powers* atau negara merupakan aktor rasional sehingga mereka mempertimbangkan preferensi negara lain dan cenderung mempengaruhi perilaku negara lain hingga negara lain mempengaruhi strategi mereka untuk *survival*.²⁸

Dalam upaya menjelaskan upaya hegemoni Amerika Serikat di regional Timur Tengah, Mearsheimer mengemukakan dalam bukunya yang berjudul *The Great Tragedy of World Politics* bahwa hegemoni dunia tidak mungkin tercapai,

²⁷ Kenneth N Waltz, "Theory of International Politics", p.119

²⁸ John J. Mearsheimer, "The Tragedy of Great Politics", in *Bedrock Assumption*

maka setiap negara yang telah mencapai hegemoni regionalnya perlu untuk mencegah adanya pesaing hegemoni di kawasan.²⁹ Mearsheimer beranggapan bahwa anarki yang memaksa negara memperebutkan kekuasaan, sehingga tujuan sebuah negara yang memiliki kapabilitas militer dan ekonomi yang besar adalah mendominasi keseluruhan sistem sehingga cara tersebut membuat negara lain akan berpikir untuk menyerang negara tersebut.³⁰

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif yang dimaksud mengacu pada klasifikasi data dan menekankan makna dari perilaku negara dalam konteks sosial, politik, dan bukan penelitian yang menampilkan melalui basis angka atau peringkat. Peneliti pun menggunakan penelitian deskriptif analitis yang mencakup upaya-upaya menganalisis data secara induktif dan melakukan penafsiran atas makna dari data yang disediakan.³¹

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik studi pustaka dan pengumpulan data sekunder untuk mendapatkan data yang diperlukan bagi penelitian. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data-data yang diambil dari

²⁹ John J. Mearsheimer, *The Tragedy of Great Power Politics*, 4-5

³⁰ Robert Jackson, Georg Sorensen, "Introduction to International Relations: Theory and Approaches", 82-85

³¹ John W. Creswell. (2009), *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* Third Edition, SAGE Publications: California, 14

situs-situs *website*, jurnal ilmiah, buku, dan laporan resmi yang relevan dengan topik penelitian.

1.7 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terbagi kedalam lima bab. **Bab I** merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pembahasan masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran, metode penulisan dan teknik pengumpulan data, serta sistematika pembahasan.

Bab II Bab 2 akan terbagi ke dalam dua sub bab. Sub bab pertama akan membahas mengenai kondisi internal Libya pasca Arab Springs dan peningkatan pengaruh kelompok terorisme di Timur Tengah dan Afrika Utara. Kemudian sub bab kedua akan membahas mengenai kepentingan nasional Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara melalui teori *national interest* Robert J. Art yang dibagi ke dalam vital, highly important, dan important dan peran Amerika Serikat di Libya pasca Arab Springs dalam upaya menghilangkan pengaruh terorisme melalui strategi *offshore balancing* dan *selective engagement*

Bab III akan membahas mengenai upaya Amerika Serikat melalui *balnce of power* menjaga hegemoni nya di regional tersebut dalam upaya untuk memenuhi kepentingan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara pasca Arab Springs melalui *Bedrock Assumption* yang dikemukakan oleh J.J Mersheimer. Hal tersebut meliputi bagaimana posisi AS dalam upaya

mempertahankan akses terhadap minyak di Timur Tengah, kepentingan AS dalam upaya melawan terorisme, dan menyebarkan paham demokrasi.

Bab IV akan berisikan mengenai hasil dan kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan.

